

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN INTERN PERMERINTAH DAERAH TERHADAP
KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**YOSI JUITA
NIM: 57716 / 2010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

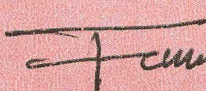


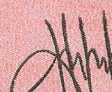
**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN**

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi)

Nama : Yosi Juita
NIM/BP : 57716/2010
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2014

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1 Ketua : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	 _____
2 Sekretaris : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	 _____
3 Anggota : Salma Taqwa, SE, M.Si	 _____
4 Anggota : Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	 _____

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi)**

Nama : Yosi Juita
NIM/BP : 57716 / 2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19730213 199903 1 003



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP: 19781204 200801 2 011

**Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi**

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yosi Juita
Nim/ BP : 57716 / 2010
TempatTanggal Lahir : Padang, 11 Pebruari 1981
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Mutiara Indah RT 002 / RW III, No : 15 Padang
Besi
No.Hp : 081374447575
JudulSkripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas
Informasi Laporan Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/Skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun di universitas lainnya
2. Karya tulis/Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam karya tulis/Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis/Skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2014
Yang Menyatakan

Yosi Juita
Nim. 57716/ 2010

ABSTRAK

Yosi Juita (201057716), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengawasan Intern Permerintah Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi)

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M. Sc, Ak

Pembimbing II : Erly Mulyani, SE, M. Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan pengaruh pengawasan intern pemerintah daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

Penelitian ini berjenis deskriptif kausatif yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) terhadap variabel akibat (Y). Populasi penelitian ini terdiri dari intansi pemerintahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi sebanyak 87 orang, sehingga sampel penelitian ini adalah *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) terdapatnya pengaruh signifikan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan nilai t sebesar 2,069 atau tingkat signifikansi 0,042 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05), 2) terdapatnya pengaruh signifikan antara Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan nilai t sebesar 3,184 atau tingkat singnifikan 0,004 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05). Maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan Intern Permerintah Daerah dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengawasan Intern Permerintah Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi peneliti pada Fakultas Ekonomi pada Universitas Negeri Padang. Selesainya Penelitian ini, juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Yunia Wardi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M. Sc, Ak, selaku Ketua Prodi sekaligus pembimbing I yang telah membantu peneliti dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
3. Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Akuntansi
4. Ibu Erly Mulyani, SE, M. Si, Ak I pembimbing II yang telah membantu peneliti dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu staf dosen beserta karyawan yang telah membantu penulis selama masa pendidikan.
6. Bapak/Ibu pimpinan dan staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bukittinggi yang telah membantu peneliti untuk melengkapi hasil penelitian ini.
7. Keluarga yang tercinta yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu rekan seangkatan dan seperjuangan serta berbagai pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti meminta saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi yang akan datang. Terakhir, peneliti menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana yang disusun ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin.

Padang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan penelitian	7
F. Manfaat penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	9
1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
a) Laporan Keuangan	9
b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
c) Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..	13
2. Penerapan Standar akuntansi pemerintah	20
a) Konsep Standar Akuntansi Pemerintah	21
b) Fungsi dan Ruang lingkup akuntansi pemerintah	24
3. Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah	28
a) Pengertian Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.....	28
b) Komponen Pengawasan Intern Pemerintah.....	31
c) Bentuk-Bentuk Pengawasan Pemerintah.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Hubungan Antar variabel	43

D. Kerangka Konseptual	45
E. Hipotesis Penelitian	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Populasi, Sampel dan Responden Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Variabel Penelitian.....	50
F. Instrumen Penelitian	50
G. Uji Validitas dan Realibilitas	52
H. Uji Coba Instrumen.....	53
I. Uji Asumsi Klasik.....	54
J. Teknik analisis Data.....	55
K. Definisi Variabel	59
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	60
B. Demografi Responden	60
C. Distribusi Variabel	65
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	70
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	75
F. Teknik Analisa Data	77
G. Pembahasan.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Populasi Responden Berdasarkan Unit Kerja.....	47
Tabel 2. Skala Likert	51
Tabel 3. Indikator variabel Penelitian.....	51
Tabel 4. Uji Realiabilitas Butir Instrumen Penelitian.....	54
Tabel 5. Klassifikasi Tingkat Capaian Responden	57
Tabel 6. Tingkat Pengembalian Quisioner	60
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	61
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	62
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	63
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	64
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan ...	64
Tabel 13. Tingkat Capaian Responden Kualitas Informasi Laporan Keuangan	65
Tabel 14. Tingkat Capaian Responden Penerapan SAP	67
Tabel 15. Tingkat Capaian Responden Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	69
Tabel 16. Hasil Pengujian Variabel Penerapan SAP (X1)	71
Tabel 17. Hasil Pengujian Variabel PIP Daearah (X2)	72
Tabel 18. Hasil Pengujian Variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan	73
Tabel 19. Hasil Uji Reliability Statistics Variabel Penelitian	74
Tabel 20. Hasil Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	75
Tabel 21. Hasil Uji Multiklolinearitas	76
Tabel 22. Hasil Analisis Linear Berganda (Coefficients(a))	77
Tabel 23. Hasil Analisis Determinan (Model Summary(b))	79
Tabel 24. Uji F (ANOVA(b))	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan	16
Gambar 2. Kerangka Konseptual	45
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Angket Uji Coba Penelitian	90
Angket Penelitian	94
Reliability Statistics Variabel	99
Model Summary(b).....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Tujuan yang dicapai pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Keuangan negara atau daerah menurut Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Pertanggungjawaban tersebut tentunya tergambarkan pada informasi yang diberikan dari laporan keuangan yang telah diterbitkan secara periodik pada suatu pemerintahan.

Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip yang berlaku. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung

pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tentunya laporan keuangan yang disajikan memerlukan pengawasan dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

Standar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah agar bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sudah sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Menurut Mardiasmo (2006:1) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Artinya SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang memberikan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pengawasan intern pemerintah merupakan aktivitas pengungkapan dan penilaian yang dilaksanakan di dalam entitas untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan Badan Pengawasan Daerah disebut Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIPD) yang menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD). Pengawasan intern pemerintah membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan proses tata kelola (*governance processes*) (Kuntadi, 2009:15).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada instansi dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka sebagai pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan pencatatan akuntansi. Pencatatan atas transaksi akuntansi tersebut berfungsi untuk menyiapkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP dan mampu menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2009 Kota Bukittinggi, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada Tahun 2010 opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Bukittinggi tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tahun 2011 juga masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan intern pemerintahan (SPI) Kota Bukittinggi (www.bpkri.go.id)

Pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LKPD kota Bukittinggi disebabkan oleh kesalahan yang ditemukan TIM BPK sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu 1) masih adanya perjalanan fiktif, dimana adanya perbedaan antara kenyataan yang dilakukan dengan laporan yang telah disajikan, 2) Kesalahan penganggaran belanja, 3) kesalahan inventaris atau revaluasi asset terutama tidak termasuk kelompok asset tetap, pengelolaan dan penatausahaan persediaan, 4) Kesalahan penggunaan langsung anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke kas daerah. Semua permasalahan ini tentunya dapat dilihat pada informasi laporan keuangan yang disajikan pada masing-masing SKPD. Hal ini tentunya juga memperlihatkan lemahnya Pengawasan Intern Daerah. (Koran Haluan media group Sumbar-Riau-Kepri (edisi 502 Tahun XIII, Jum'at 24 Juni 2011).

Penerapan Standar Akuntansi pemerintah SKPD Kota Bukittinggi dan Pengawasan Intern Daerah belum optimal dilaksanakan, karena kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Apabila laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi yang relevan, andal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia, berarti menunjukkan lemahnya pengawasan intern daerah. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah penting, kurang optimalnya kinerja pemerintahan kota Bukittinggi, akan memberikan citra yang tidak baik dihadapan masyarakat, maka diperlukan peran pimpinan dan pegawai masing-masing SKPD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Penjelasan diatas, sebelumnya juga telah membuktikan secara empirik telah dibuktikan oleh Kusumah (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Penelitian Hindriani (2012) juga memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal. Perbedaan penelitian ini berada pada variabel penelitian dan objek dari penelitian. Variabel independen yang akan diteliti adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Intern Permerintahan Daerah, sedangkan variabel dependennya yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Objek penelitian ini terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

Uraian di atas membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang:
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengawasan Intern Permerintahan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.
2. Kurangnya pemahaman pegawai aparatur pemerintah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga kualitas laporan keuangan tidak dapat disajikan dengan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Bukittinggi.
3. Kurangnya pengawasan intern pemerintah dalam mengontrol dan menjaga pelaksanaan penyajian laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Bukittinggi.
4. Ketidakpedulian dan tanggungjawab SKPD dalam mengelola anggaran yang telah ditetapkan di kota Bukittinggi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi pembahasan masalah dengan tujuan supaya penelitian ini lebih terarah. Peneliti memfokuskan permasalahan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Responden penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi?
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan intern pemerintahan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.
2. Pengaruh pengawasan intern pemerintahan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak terutama:

1. Bagi Peneliti

Mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang masalah-masalah pelaksanaan kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga peneliti dapat mempelajari lebih lanjut bagaimana menciptakan kualitas laporan keuangan dengan baik dan benar.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Sumbangan informasi bagi pemerintah pada instansi terkait, untuk mengetahui besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintah dan pengawasan intern pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

3. Bagi Masyarakat

Mendorong masyarakat agar lebih peduli dengan informasi laporan keuangan dari pemerintah, sehingga berpartisipasi dalam mengawasi dan mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

4. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Negeri Padang, baik sebagai bahan pertimbangan, acuan maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a) Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Apalagi informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk berbagai pihak seperti investor, kreditur, pemerintah, bankers, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Selanjutnya juga mengatakan bahwa Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya, (PSAK, 2002:47). sedangkan Harahap (2006:105) mengatakan laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Menurut Munawir (2002:13) menyatakan laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya, Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan Harga Pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain. Selanjutnya Jenis laporan keuangan menurut Harahap (2006:106) terdiri dari jenis laporan keuangan utama dan pendukung, seperti; Daftar Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Harga Pokok Produksi, Laporan Laba Ditahan, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Kegiatan Keuangan.

Menurut Hanafi dan Halim (2002:63) juga menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, paragraf 12 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, dan juga bisa dikatakan potret sebuah organisasi yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen dalam kondisi yang baik atau tidak untuk menjalankan aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan, pada periode tertentu.

b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan mengelola organisasi, Kualitas menurut Mulyana (2010:96) adalah: “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Menurut Masmudi (2003:77) definisi laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode tersebut dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor

swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standard Board* (2009:54) adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya.
- 2) Melaporkan hasil operasi.
- 3) Melaporkan kondisi keuangan.
- 4) Melaporkan sumberdaya jangka panjang

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber- sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai: 1) Pengurusan dan ketaatan, 2) Kondisi keuangan, 3) Kinerja, 4) Dampak ekonomi.

Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2000:17) yaitu: “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan” Dari kedua pemaparan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya, Sedangkan Halim (2005:13) menyatakan bahwa “keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.

c) Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Payanta (2006:83) bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan suatu media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar entitas. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan Bastian (2003:48): dapat dikategorikan sebagi berikut: 1) kualitas tertinggi; dapat dipahami dan

berguna, 2) kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji), 3) kualitas sekunder; konsisten, komparatif, 4) kendala; *materialitas, konservatif*, biaya manfaat.

Berikut beberapa pendapat mengenai konsep kualitas informasi laporan keuangan:

Menurut Wilkinson (2000:18) menyatakan bahwa:

“The value of information, and hence the soundness of decisions, can be affected by qualities that attach to the information. Useful information qualities are relevance, accuracy, timeliness, conciseness, clarity, quantifiability, consistency”.

Menurut Hilton, et, al., (2000:551) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas sebagai berikut :

“Three characteristics of information determine its usefulness for decision making; (a) Relevance, information is relevant if it is pertinent to a decision problem; (b) Accuracy, information that is pertinent to a decision problem must also be accurate; (c) Timeliness, relevant and accurate data are valuable only if they are timely, that is available in time for decision”.

Menurut Hongren, et, al., (2003:168) lebih menekankan pada informasi yang relevan dan akurat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan:

“Information used for decision making would be perfectly relevant and accurate. Precise but irrelevant information is worthless for decision making. Imprecise but relevant information can be useful. Relevant is more crucial than precision in decision making”.

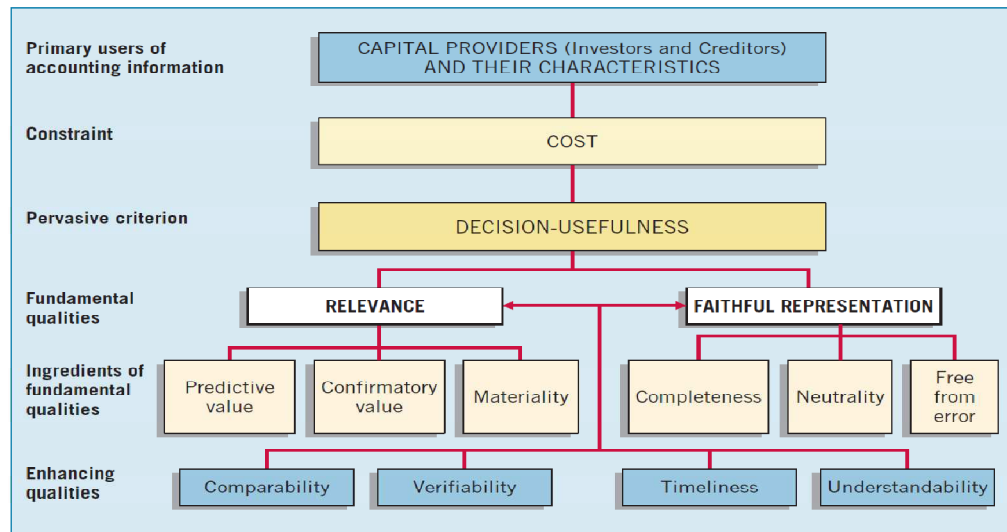
Menurut Wilson, et, al., (2001:994) lebih lanjut menjelaskan:

“There are some factors that will assist in getting an improved reception from the leader: (1) report should be timely. A late report is almost as useless as no report at all, and (2) report must be accurate. Errors on reports result in a lack of confidence in them and in accounting departemen”.

Pengertian Pelaporan Keuangan menurut Baridwan (2000:3) adalah sebagai berikut: “Informasi keuangan suatu organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja, pelaporan keuangan menyangkut laporan keuangan utama yang terdiri atas neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan”. Sedangkan menurut Bodnar (2003:10) menyatakan bahwa kualitas informasi laporan keuangan yaitu *relevant, understandable, comparable dan reliable*. Kualitas informasi laporan keuangan dilihat sebagai produk adalah tergantung kepada sejauh mana informasi laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengambilan. Agar pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tersebut harus memenuhi prinsip karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia bahwa: “karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif pokok yang membuat informasi dalam laporan keuangan berkualitas yaitu: dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan”. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Blanchet, (2000) yang menunjukkan temuan bahwa karakteristik kualitatif merupakan alat pengukuran yang valid dan dapat diandalkan untuk menilai kualitas informasi laporan keuangan.

Gambaran kerangka karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang dikemukakan dalam SFAC No. 8 Tahun 2010 yang menggantikan SFAC No 2 Tahun 1980 dalam *Financial Accounting Standard Board* (2010) sebagai berikut :



Gambar 1. Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan
Sumber: SFAC No. 8 dalam *Financial Accounting Standard Board* (2010)

Berdasarkan gambar 1. di atas dapat dilihat bahwa kualitas informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan adalah *relevance* dan *faithfull representation*. Relevansi informasi laporan keuangan tergantung kepada apakah informasi laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat memprediksi kedepan (*predictive value*), dapat dikonfirmasi (*confirmatory value*) dan memenuhi prinsip materislitas (*Materiality*). *Faithfull representation* (*penyajian secara lengkap dan jujur*) informasi laporan keuangan tergantung kepada kelengkapan informasi (*completeness*), disajikan secara netral tanpa berpihak kepada kepentingan tertentu (*neutrality*) dan dan bebas dari kesalahan (*free from*

error). Untuk meningkatkan kualitas informasi maka kedua karakteristik tersebut (*relevance* dan *faithfull representation*) dihubungkan dengan *comparability, verifiability, timeliness dan understandability*.

Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan untuk sektor pemerintahan dinyatakan dalam *Governmental Accounting Standards Board (GASB, 2009)* dalam *Concepts Statement No.1* tentang tujuan laporan keuangan yaitu:

- 1) *Understandable. Governmental financial reporting should be expressed as simply as possible so that financial reports can be understood by those who may not have detailed knowledge of accounting principles.*
- 2) *Reliable . The information presented in financial reports should be verifiable, free from bias, and should faithfully represent what it purports to represent.*
- 3) *Relevant. Relevancy implies that there is a close logical connection between the information provided in financial reporting and its purpose.*
- 4) *Timely. If financial reports are to be useful, they must be issued soon enough after the reported events to affect decisions.*
- 5) *Consistent. Presumably, once an accounting principle or reporting method is adopted, it will be used for all similar transactions and events. Consistency should extend to all areas of financial reporting, including valuation methods, basis of accounting, and determination of the financial reporting entity.*
- 6) *Comparable. Financial reporting should facilitate comparisons between governments, such as comparing costs of specific functions or components of revenue. Comparability implies that differences between financial reports should be due to substantive differences in the underlying transactions or the governmental structure, rather than selection among different alternatives in accounting procedures or practices”.*

Karakteristik tersebut di atas diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan

dalam informasi laporan keuangan sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kriteria informasi yang relevan:

2) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

3) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

4) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

5) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

6) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

7) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

8) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah kemudahan yang dapat dipahami oleh para pemakai yang memberikan informasi keuangan tentang aktivitas kegiatan pemerintahan daerah, dimana indikator yang digunakan adalah a) relevan, b) memiliki manfaat umpan balik, c) memiliki manfaat prediktif, d) tepat waktu, e) lengkap f) andal, g) dapat dibandingkan h) dapat dipahami

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada 13 Juni 2005. Hal tersebut merupakan jawaban pemerintah atas tuntutan akan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Standar Akuntansi Pemerintah juga merupakan amanat dari 3 (tiga) undang-undang yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ketiganya dengan tegas menyatakan laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

a) Konsep Standar Akuntansi Pemerintah

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang

telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut diatas, Presiden menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan.

KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk Proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah

Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan tujuan:

- 1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 2) SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- 3) SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 bertujuan untuk:

- 1) Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan
- 2) Manajemen; memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- 3) Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders
- 4) Keseimbangan Antar Generasi; memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang ada ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan menurut Nordiawan (2006:7) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu: 1) Tujuan pertanggungjawaban, 2) Tujuan manajerial, 3) Tujuan pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- 2) Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.
- 3) Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas.

Dari keterangan tersebut di atas, diharapkan dengan adanya akuntansi pemerintah, mampu membangun hubungan kepercayaan yang baik antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan masyarakat melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

b) Fungsi dan Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah

Keberadaan pemerintah merupakan suatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah didalamnya. Adapun fungsi utama

pemerintah adalah fungsi stabilisasi, fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Jika tidak ada pemerintah, maka masyarakat akan hidup dalam ketidakteraturan dan ketidaktertiban. Kehadiran pemerintah adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan tertib, aman dan teratur.

Menurut PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya dikutip dari Bastian (2003:75) fungsi pemerintah yaitu:

- 1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
- 2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
- 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya.

Sebagai pemegang kekuasaan, sudah seharusnya pemerintah menegakkan keadilan dan hasil kinerjanya harus berorientasi pada masyarakat untuk mengatur, menertibkan, dan mensejahterakan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2006:01) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan

pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Pada halaman selanjutnya, akan diuraikan poin-poin yang merupakan ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu:

- 1) Lingkungan akuntansi pemerintahan
- 2) Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
- 3) Entitas pelaporan
- 4) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum
- 5) Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi keuangan.
- 6) Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

Sektor publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga

karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, sektor publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi nirlaba lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi pemerintahan dikemukakan Arif (2002:6) adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem pemerintahan, dalam sistem monarki/kerajaan akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja jika dibandingkan dengan parlemen. Di dalam sistem demokrasi parlementer atau presidensial, akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislative yang mengalami *check and balances*.
- 2) Sifat sumber daya, sumber daya akuntansi pemerintahan bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Seorang warga yang menyetorkan pajak, tidak mengharapkan kontra prestasi secara langsung dari kontribusinya tersebut. Berbeda dengan hal ini, pada akuntansi bisnis yang sumber dayanya terkait secara langsung dengan hasilnya, seperti adanya dividen.
- 3) Politik, akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh politik. Sebagai contoh adalah anggaran yang sarat dengan aspek politik. Anggaran diartikan sebagai alat politik, maka dalam proses persetujuan anggaran, terjadi negosiasi politik antara lembaga legislative yang terdiri dari wakil

partai politik dan pemerintah (biasanya pemenang proses politik pada suatu jangka waktu tertentu).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk melihat penerapan standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan adalah 1) Akuntabilitas (mempertanggungjawabkan) 2) Manajemen (fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah), 3) Transparansi (terbuka, jujur), 4) Keseimbangan Antargenerasi (informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran)

3. Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

a) Pengertian Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004).

Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern

pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008), sedangkan Susmanto (2008) menjelaskan bahwa APIP melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (*fungsi quality assurance*).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, kegiatan utama APIP meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

- 1) Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
- 2) Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif
- 3) Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang

menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang (1994:20) mengemukakan agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab, sehingga Mulyadi (2001:163) menyatakan bahwa adanya tujuan sistem pengawasan internal adalah: menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan intern menurut Mulyadi (2001:163) adalah: “Pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya

kebijakan manajemen”. Sedangkan menurut SAS (Statement on Auditing Standard) mendefinisikan pengawasan intern sebagai berikut:

- 1) Pengawasan administrasi, meliputi struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan transaksi yang diotorisasi oleh manajemen.
- 2) Pengawasan akuntansi, meliputi struktur organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang, pengawasan intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

b) Komponen Pengawasan Intern Pemerintah

Pengawasan intern terdiri dari lima komponen saling berhubungan. Komponen ini bersumber dari cara pimpinan suatu organisasi menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses manajemen. Komponen tersebut menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) yang dikutip oleh Gondidoyoto (2009:155) adalah:

1) Lingkungan Pengawasan (*Control Environment*).

Merupakan perwujudan suatu iklim manajemen di mana sejumlah orang melaksanakan kegiatan dan tanggungjawab pengendalian. Faktor lingkungan pengendalian ini termasuk integritas, etika, kompetensi, pandangan dan filosofi manajemen dan cara manajemen membagi tugas dan wewenang/tanggungjawab serta arahan dan perhatian yang diberikan pimpinan puncak.

2) Penaksiran Resiko (*Risk Assessment*)

Setiap entitas, dalam melaksanakan aktivitas menghadapi berbagai resiko, baik internal maupun eksternal yang harus diperhitungkan terkait dalam mencapai tujuan sehingga membentuk suatu basis penetapan bagaimana resiko tersebut seharusnya dikelola. Penaksiran risiko mensyaratkan adanya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3) Aktifitas Pengawasan (*Control Activities*)

Meliputi kebijakan dan prosedur yang menunjang arahan dari manajemen untuk diikuti. Kebijakan dan prosedur tersebut memungkinkan diambilnya tindakan dengan mempertimbangkan risiko yang terdapat pada seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Didalamnya termasuk berbagai jenis otorisasi dan verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja dan pengamanan harta serta pemisahan tugas.

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi yang relevan perlu diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab yang baik oleh anggota organisasi. Sistem informasi menghasilkan laporan tentang kegiatan operasional dan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas.

5) Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah suatu proses yang mengevaluasi kualitas kinerja Sistem Pengendalian Manajemen pada saat kegiatan berlangsung. Proses ini diselenggarakan melalui aktivitas pemantauan yang berkesinambungan dan melalui pengawasan (audit) intern atau melalui kedua-duanya

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (1), Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) meliputi: a) penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, b) sosialisasi SPIP, c) Pendidikan dan pelatihan SPIP, d) pembimbingan dan konsultasi SPIP, e) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Komponen tersebut di atas merupakan suatu rangkaian yang terjalin erat. Komponen lingkungan pengendalian menjadi landasan bagi komponen-komponen yang

lain. Dalam lingkungan pengendalian, manajemen melakukan penaksiran resiko dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti. Sementara informasi yang relevan dicatat dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Selanjutnya keseluruhan proses tersebut dipantau secara terus menerus dan diperbaiki bilamana perlu

c) Bentuk Pengawasan Pemerintah

Menurut Cahyat (2004), berdasarkan obyek pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Produk Hukum dan Kebijakan Daerah

Pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan dilakukan secara represif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Produk hukum dan kebijakan yang menjadi objek pengawasan adalah: a) Peraturan daerah (Perda) Kabupaten, b) Keputusan Bupati, c) Keputusan DPRD Kabupaten.

2) Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh:

(a) Pengawasan oleh DPRD

Dalam hal pelaksanaan, DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan: a) Peraturan Daerah (Perda), b) SK Bupati, c) Peraturan Perundangan lainnya, d) Kerjasama Internasional. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga negara masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

(b) Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Pengawasan Internal Pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Bupati. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga Pengawas yang saat ini umumnya disebut Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Bawasda adalah lembaga teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan. Secara umum, pengawasan internal pemerintah kabupaten mencakup: a) Penyelenggaraan pemerintah daerah, b) Kinerja aparatur pemerintah daerah.

(c) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat

Pengawasan pelaksanaan oleh pemerintah pusat dibagi menjadi dua bagian:

- i) Pengawasan oleh Mendagri dan Otda mencakup pengawasan terhadap: penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja otonomi daerah, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangnya, efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- ii) Pengawasan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Pusat Non-Kementrian dapat dilakukan di bawah koordinasi Mendagri dan Otda. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap: Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangnya, Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Pengawasan oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- (i) Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu.
- (ii) Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
- (iii) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

(iv) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan.

Pemerintah pusat di bawah koordinasi Mendagri dan Otda dapat memberikan sanksi terhadap pemerintah kabupaten dan/atau aparatnya yang menolak pelaksanaan, serta tindaklanjut hasil pengawasan berdasarkan undang-undang.

(d) Pengawasan oleh Masyarakat

Menurut Widodo (2011:475), mengemukakan pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok, maupun organisasi dengan cara:

- (i) Pemberian informasi adanya indikasi adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme di lingkungan pemerintah daerah atau DPRD
- (ii) Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah.

3) Pengawasan Keuangan Daerah

a) Pengawasan oleh DPRD

DPRD memiliki kewenangan terhadap pengawasan pelaksanaan APBD sebagai pengawasan keuangan eksternal tingkat kabupaten. Dalam pengawasan keuangan DPRD provinsi/kabupaten/kota dalam melakukannya lewat dengar pendapat, kunjungan kerja, panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk dengan peraturan tata tertib DPRD.

b) Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah

Bawasda memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan keuangan. Beberapa keuangan provinsi/kabupaten/kota bidang pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah: a) Pelaksana APBD, b) Penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, c) Pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan atau penghapusan barang/jasa, d) Penyelesaian ganti rugi, e) Inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda

c) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat

(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintahan pusat non departemen yang dibentuk lewat Keppres No.103 Tahun 2001. BPKP bertugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan APBN. Untuk menjalankan tugasnya BPKP dapat melakukan: (i) audit keuangan; (ii) investigasi; dan (iii) evaluasi kerja dan manajemen organisasi.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan pemerintah, DPR, MA dan DPA. Dengan Demikian BPK tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah. BPK menjalankan fungsi pengawasan keuangan eksternal, berbeda dengan BPKP yang melakukan pengawasan keuangan internal.

Berdasarkan bentuk pengawasan intern Pemerintah Daerah di atas, maka pengawasan yang menjadi fokus permasalahan adalah pengawasan keuangan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan keuangan terhadap keuangan dan aset daerah adalah: a) Pelaksana APBD, b) Penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, c) Pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, d) Penyelesaian ganti rugi, e) Inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan gambaran penelitian sebagai berikut:

Penelitian Yuliani (2010) yang berjudul pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel independen yang diturunkan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0,281 lebih besar dari nilai 0. Pengaruh sebesar 28,1% menunjukkan bahwa pengaruhnya lemah karena nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,281$ lebih kecil dari 0,5. Diduga masih ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sementara itu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi mempengaruhi kualitas

laporan keuangan sebesar 20,7%, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 5% dan peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 12,1%.

Penelitian Hindriani (2012), dengan judul Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD; informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi tinggi melalui laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, namun masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan; dan Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Proses internalisasi SPIP perlu di dukung dengan penerapan hard control berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Satuan Tugas (SATGAS) implementasi SPIP. Sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan

yang handal, melalui: 1) Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak; 3) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 4) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 5) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP.

Penelitian Santoso (2008) yang berjudul tentang Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap pencegahan fraud baik secara partial maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian Nugraheni (2008) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil menunjukkan, tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebesar 46.650. Setiap penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal,

pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0.385 satuan, 0.252 satuan, dan 0.399 satuan secara berturut-turut. Artinya pengaruh penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat sedang.

Penelitian Sari (2011) yang berjudul tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, dan penyelesaian temuan audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, telah memberikan gambaran bahwa variabel independennya adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Intern Permerintahan Daerah, sedangkan variabel dependennya yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Objek penelitian ini terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah penting disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintah (SAP) pada SKPD Kota Bukittinggi, karena laporan keuangan mampu memberikan informasi yang relevan, andal dan dapat dibandingkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Kota Bukittinggi sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam menjalankan tugasnya (PP No. 24/2005).

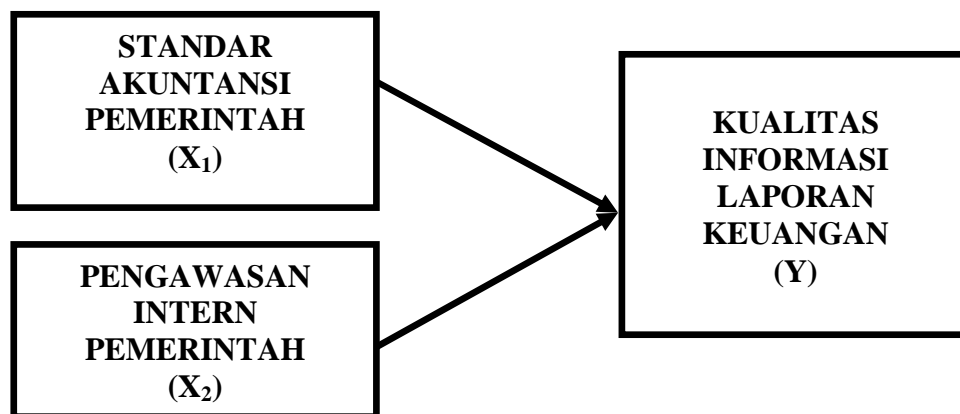
2. Pengaruh Pengawasan Intern Permerintahan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Ketidakoptimalan penyajian laporan keuangan akan menunjukkan lemahnya pengawasan intern daerah, terutama pada kinerja pemerintahan kota Bukittinggi. Hal ini akan memberikan citra yang tidak baik dihadapan masyarakat, maka diperlukan peran pimpinan dan pegawai masing-masing SKPD dalam mengwujudkan pemerintahan yang bersih. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviué atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa penilaian atas pengawasan Intern pemerintah dilakukan dengan: a) memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, b) melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada, c) melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan, d) melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviué.

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi laporan keuangan SKPD Kota Bukittinggi, maka pengawasan intern juga harus mengevaluasi kegiatan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan agar tujuan pengembangan pengawasan intern pemerintah terhadap laporan keuangan dapat menciptakan kualitas informasi yang lengkap dan dapat pertanggungjawaban.

D. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada dasarnya merupakan dugaan atau jawaban sementara permasalahan yang diteliti (Masngudi dan Salim 2012:72), maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.
- H2: Pengawasan intern pemerintahan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausatif. Menurut Sugiyono (2005:11) penelitian deskriptif “merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, menghubungkan dengan variabel yang lain”. Penelitian kausatif menurut Sugiyono (2005:12) yaitu “penelitian yang menyatakan hubungan sebab akibat”. Jadi, dalam penelitian ini menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) terhadap variabel akibat (Y).

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi Menurut Sukmadinata (2008:250) menyebutkan bahwa orang-orang, lembaga, organisasi, benda-benda yang menjadi sasaran penelitian, maka penelitian ini terdiri dari orang-orang yang berada di sebuah instansi pemerintahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi berjumlah 29 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat dengan jumlah pegawai kepala bagian dan staf akuntansi sebanyak 87 orang. Adapun uraian dari populasi dari dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Populasi Responden Berdasarkan Unit Kerja

NO	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Pegawai Kepala Bagian dan Staf Akuntansi
1	Sekretariat Daerah	10	2
2	Sekretariat DPRD	33	3
3	Inspetorat	50	6
4	Badan Penanggulangan Bencana	33	2
5	Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan PM	31	2
6	Badan Kepegawaian Daerah	98	4
7	Dinas Pengelolaan Pasar	81	3
8	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	145	7
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	46	3
10	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	97	6
11	Dinas Pekerjaan Umum	134	2
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	57	3
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	68	2
14	Dinas Pertanian	109	3
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37	4
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93	2
17	Dinas Kesehatan	264	6
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20	3
19	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	20	2
20	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu	9	2
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan, Kelurahan Nagari	30	2
22	Kantor Ketahanan Pangan	18	2
23	Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	48	4
24	Kantor Lingkungan Hidup	25	2
25	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	20	3
26	Satpol PP	13	2
27	Kecamatan Guguk Panjang	8	1
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	9	1
29	Kecamatan Madiangin Koto Selayan	8	3
JUMLAH		1.614	87

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan kota Bukittinggi

2. Sampel

Menurut Arikunto (2006) mengemukakan di dalam pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, dan jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10% – 15% atau 20% – 25% atau lebih. Penelitian ini menggunakan *totalsampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 87 orang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari objek penelitian perorangan dengan memberikan angket penelitian pada para responden untuk diisi sesuai pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Angket tersebut dikembalikan kepada peneliti untuk disusun, diolah dan diinterprestasikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Data sekunder data yang sudah jadi (tersedia) dalam penelitian ini, yang menjadi data sekundernya yang menjelaskan gambaran umum dari Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa informasi jumlah SKPD dan pegawai, dimana peneliti dapat memperoleh data tersebut melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bukittinggi yang telah diolah, dan

disajikan sebelumnya oleh masing-masing SKPD yang memuat tentang gambaran umum dari organisasi yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka sumber data diperoleh dari:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan diambil dari data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan, guna memperoleh data dari bagian-bagian yang sesuai dengan objek penelitian, dan daftar pertanyaan ini akan diedarkan kepada responden untuk memperoleh jawabannya.

b. Studi Perpustakaan

Dalam pengumpulan data ini peneliti mempelajari buku-buku literatur, makalah, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat berupa:

1. Observasi (Pengamatan) yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap responden melalui pertanyaan angket yang telah disusun sebelumnya.

2. Penyebaran angket atau kuesioner yaitu dengan memberikannya kepada responden, dimana responden penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) kota Bukittinggi kepala bagian dan staf akuntansi dengan tujuan agar pegawai dapat mengisi formulir isian secara objektif yang telah disediakan.

E. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: 1) variabel independen (variabel bebas) terdiri dari X1: Standar Akuntansi Pemerintah, X2: Pengawasan Intern Pemerintah, 2) variabel dependent (variabel terikat) yaitu Y: Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dapat membantu peneliti dalam menjelaskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Jenis Instrumen

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik komunikasi tidak langsung. Alat yang digunakan adalah kuisisioner yang akan diberikan kepada responden, kemudian diisi langsung dengan pilihan yang telah disediakan pada setiap pernyataan berdasarkan indikator variabel.

2. Skala Pengukuran Data

Skala pengukuran data menggunakan skala tingkat (Likert), sebagai berikut:

Tabel 2
Skala Likert

Skala Likert		Variabel
+	-	
5	1	Sangat Setuju
4	2	Setuju
3	3	Cukup Setuju
2	4	Kurang Setuju
1	5	Tidak setuju

3. Penyusunan Instrumen Penelitian

Berdasarkan pada indikator variabel, Penentuan indikator-indikator dilandaskan pada teori yang telah diuraikan sebelumnya, dimana indikator penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan 2. Memiliki manfaat umpan balik 3. Memiliki manfaat prediktif 4. Tepat waktu 5. Lengkap 6. Andal 7. Dapat dibandingkan 8. Dapat dipahami	Skala Likert 1-5	PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	4. Akuntabilitas 5. Manajemen 6. Transparansi 7. Keseimbangan Antar Generasi	Skala Likert 1-5	Standar Akuntansi Pemerintahan No. 24 Tahun 2005
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (X2)	1. Lingkungan Pengawasan 2. Penaksiran Resiko 3. Aktivitas Pengawasan 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	Skala Likert 1-5	Gondidoyoto (2009:155)

G. Uji Validitas dan Realibilitas

1. Validitas Data

Angket penelitian ini dicari dengan menguji validitas isi (*Content Validity*). Menurut Sugiyono (2006:129) Instrumen akan dapat dikatakan memiliki taraf validitas yang baik jika betul-betul dapat mengukur apa yang akan di ukur. Untuk mengetahui validitas butir angket digunakan rumus *korelasi product moment*, karena menurut pendapat peneliti rumus korelasi *product moment* sangat cocok untuk mengukur validitas butir angket.

Menurut Gozali (2005) menjelaskan bahwa hasil perhitungan nilai korelasi *product moment* (rhitung) selanjutnya dibandingkan dengan nilai rtabel. Nilai rtabel diperoleh dari tabel *statistik product moment* pada derajat bebas uji 2 (dua) sisi dan alpha 5% untuk jumlah responden sebanyak 30 orang yang akan digunakan pada sampel uji coba. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- a. Jika nilai rhitung lebih besar (\geq) dari nilai rtabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, dinyatakan valid dan dapat dipergunakan.
- b. Jika nilai rhitung lebih kecil (\leq) dari nilai rtabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dipergunakan.

Uji coba angket penelitian ini diberikan kepada 30 orang mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi UNP yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik Lanjutan dan Seminar akuntansi Sektor Publik. Pengujian bermaksud memberikan kelayakan

terhadap item pertanyaan yang pada angket. Apabila item angket tidak valid, artinya rhitung lebih kecil dari rtabel, maka item tersebut dibuang dan dilakukan analisis pengujian kembali sampai semua item dinyatakan valid.

2. Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan *Cronbach Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam angket berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Priyatno (2008:25) uji rentabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Menurut sekarang (1992) yang di dalam buku mandiri SPSS, Priyatno (2008:26) menjelaskan rentabilitas kurang 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan 0,8 adalah baik.

H. Hasil Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen angket penelitian yang diberikan kepada 30 orang mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi UNP bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian. Item masing-masing angket digunakan $r_{tabel} = n-2 = 30-2 = 28$ adalah 0,3610, apabila rhitung $>r_{tabel}$, maka masing-masing item variabel dapat dikatakan valid.

Berdasarkan pengolahan data uji coba, maka rekapitulasi hasil pengolahan dapat dilihat pada lampiran yang menjelaskan bahwa semua ítem variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Pengawasan Intern Pemerintah (X2), Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) dikatakan valid. Semua item-item yang dianggap valid akan dilakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur yang menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan hasil sebesar 0,8 artinya reliabilitas pengujian baik yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Uji Reliabilitas Butir Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
1	Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	0,966	0,968	15
2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,871	0,879	15
3	Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (X2)	0,913	0,913	15

Sumber data: Olahan Data Primer 2014

I. Uji Asumsi Klasik

Pengujian klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik menurut Umar (2008:175) dalam model regresi berganda. Adapun tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter tidak bias yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residu dilakukan dengan menggunakan one Sample Kolmogorov-Smirnov

dengan melihat signifikansi residual, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Metode pengujiannya dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi. Santoso (2001) dikutip dalam buku Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik (Priyatno, 2008:39) pada umumnya jika VIF kurang dari 10, maka variabel tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebasnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*standardiized* (Ghozali, 2001). Apabila hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

J. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data responden, maka dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan SPSS versi 20. Teknik analisis data

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dari analisa data sebagai berikut:

1. Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis median, standar deviasi, tingkat pencapaian responden dan koefisien serta memberikan interpretasi analisis tersebut menghitung nilai jawaban:

- a. Menghitung nilai frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.
- b. Menghitung rata-rata nilai skor, total item dengan menggunakan rumus:

$$\frac{5 \text{ SS} + 4 \text{ S} + 3 \text{ RR} + 2 \text{ TS} + 1 \text{ STS}}{15}$$

Dimana:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- CS = Cukup Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Sugiyono (2008:53)

- c. Menghitung Skor Rata-rata=Mean=(\bar{X}) dengan rumus

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

Sugiyono (2008:54)

Dimana:

- \bar{X} = Nilai rata-rata
- $\sum f_i$ = Jumlah data / sampel
- $\sum f_i x_i$ = Perkalian f_i pada interval dengan tanda kelas (x_i)

- d. Menghitung tingkat capaian responden (TCR), masing-masing kategori jawaban dari deskripsi variabel dengan rumus:

$$\text{TCR} = \frac{\text{Skor rata-rata}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Sudjana (2009:29)

Dengan kriteria nilai tingkat capaian responden diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5
Klasifikasi Tingkat Capaian Responden

Tingkat Capaian Responden (%)	Kriteria
90 – 100	Sangat Baik
80 – 89	Baik
65 – 79	Cukup
55 – 64	Kurang Baik
0 – 54	Tidak Baik

Sumber: Sudjana (2009:29)

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah analisis untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X_1, X_2) dan variabel dependen (Y). Rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y'	: Variabel Y
a	: Konstanta (nilai Y apabila $X=0$)
b_1, b_2	: Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau pun penurunan)
X_1	: Variabel X_1
X_2	: Variabel X_2

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan variabel bebas secara bersama-sama. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square.

Hasil perhitungan *Adjusted R²* dapat dilihat pada output *Model Summary*. Pada kolom *Adjusted R²* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara (X_1, X_2) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat pada uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

K. Definisi Operasional

1. Variabel Independen (X)

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penelitian ini melihat prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum. Penyajian kualitas laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah (X2)

Pengawasan intern dalam penelitian ini membandingkan pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, dengan maksud untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

2. Variabel Dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Informasi laporan keuangan pemerintahan merupakan kemudahan yang dapat dipahami oleh para pemakai yang memberikan informasi keuangan tentang aktivitas kegiatan pemerintahan daerah agar pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan yang diajukan harus memenuhi prinsip karakteristik kualitas laporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah kepala bagian dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlahnya tidak melebihi dari 100 subjek.

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan tidak ada satu pun SKPD yang menolak menerima angket, sehingga sampel yang direncanakan 87 SKPD semuanya mengisi dengan lengkap. Hingga batas akhir pengumpulan data, angket yang diterima kembali sebanyak 87 angket. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan angket adalah tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014. Penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Angket yang disebar	87
2	Jumlah angket yang kembali	87
3	Jumlah angket yang dapat diolah	87
Respoden Rate		100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

B. Demografi Responden

Berdasarkan data yang diisi oleh responden sebanyak 87 orang pada angket penelitian, dapat diketahui karakteristik responden disajikan secara umum menurut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, masa kerja, jabatan dan latar belakang pendidikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan dari responden maka, diperoleh informasi tentang jumlah responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 7
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
	Laki-laki	31	35,6
	Perempuan	56	64,4
	Total	87	100

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah terdapat 87 Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi yang terdiri dari 31 orang (35,6%) berjenis kelamin laki-laki dan 56 orang (64,4%) berjenis kelamin perempuan, sehingga dapat disimpulkan proporsi pegawai berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan perbedaan sebesar 56 orang (64,4%).

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan kuesioner yang di kumpulkan dari responden maka, diperoleh informasi usia responden sebagai berikut:

Tabel 8
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia Responden	Jumlah	%
1	>20 TH	6	6,9
2	31-40 TH	29	33,3
3	41-50 TH	23	26,4
4	>50 TH	29	33,3
	Total	87	100

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Usia yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan aktivitas rutin di kantor. Karakteristik usia pegawai > 20 tahun terdapat sebanyak 6 orang (6,9%), usia 31-40 sebanyak 29 orang (33,3%), usia 41-50 sebanyak 23 orang (26,4%) dan usia > 50 sebanyak 29 orang (33,3). Jadi dapat dilihat bahwa tingkat usia responden di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi paling banyak adalah pegawai yang berusia 31-40 tahun dan lebih dari 50 tahun.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Responden

Berdasarkan kuesioner yang di kumpulkan dari responden maka, diperoleh informasi pendidikan terakhir responden sebagai berikut:

Tabel 9
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan Responden	Jumlah	%
1	SLTA	24	27,6
2	D3	44	50,6
3	S1	17	19,5
4	>S2	2	2,3
Total		87	100

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan pegawai dalam menganalisa sebuah pekerjaan. Pegawai yang berpendidikan rendah akan sulit mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Karakteristik tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi adalah 24 orang (27,6%) memiliki tingkat pendidikan tamatan SMA sederajat, 44 orang (50,6%) tamatan D3, S1 tercatat sebanyak 17 orang (19,5%), dan >S2 terdapat 2 orang (2,3%). Jadi dapat

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai masih tergolong rendah. Artinya tingkat pendidikan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami standar akuntansi pemerintah, sehingga akan berpengaruh pada penyajian kualitas informasi laporan keuangan.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan kuesioner yang di kumpulkan dari responden maka, diperoleh informasi masa kerja responden sebagai berikut:

Tabel 10
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
	< 5 TH	11	12,6
	6-10 TH	29	33,3
	11-15 TH	30	34,5
	>15 TH	17	19,5
	Total	87	100

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Masa kerja memberikan pengalaman bagi pegawai dalam menyelesaikan masalah pekerjaan. Karakteristik masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi adalah 11 orang (12,6%) memiliki masa kerja kurang dari 5 Tahun, 29 orang (33,3%) memiliki masa kerja 6-10 Tahun dan 30 orang (34,5%) memiliki masa kerja 11-15 Tahun, serta 17 orang (19,5%) memiliki masa kerja lebih dari 15 Tahun.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan kuesioner yang di kumpulkan dari responden maka, diperoleh informasi jabatan responden sebagai berikut:

Tabel 11
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Kepala Badan/Dinas/ Instansi	21	24,1
2	Sekretaris/Kabid/Kabag	34	39,1
3	Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/ Kasie	32	36,8
	Total	87	100

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Jabatan salah satu bentuk kepercayaan dari sebuah kemampuan dalam mengolah manajemen dalam sebuah pekerjaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Karakteristik pegawai berdasarkan jabatan adalah Badan/Dinas/ Instansi sebanyak 21 orang (24,1%), Sekretaris/Kabid/Kabag sebanyak 34 orang (39,1%), Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/ Kasie sebanyak 32 orang (36,8%).

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang di kumpulkan dari responden maka, diperoleh informasi masa kerja responden sebagai berikut:

Tabel 12
Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	%
	Ekonomi / Akuntansi	31	35,6
	Hukum	23	26,4
	Teknik	18	20,7
	Sosial	15	17,2
	Total	87	100

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Latar belakang pendidikan merupakan peranan yang terpenting dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah laporan keuangan pemerintah agar menjadi informasi yang berkualitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Karakteristik pegawai berdasarkan latar belakang

pendidikan adalah bidang ekonomi / akuntansi sebanyak 31 orang (35,6%), bidang hukum sebanyak 23 orang (26,4%), bidang teknik sebanyak 18 orang (20,7%), dan bidang sosial sebanyak 15 orang (17,2%). Jadi dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pegawai memiliki latar belakang pendidikan dibidang ekonomi / akuntansi.

C. Distribusi Variabel

Distribusi variabel dapat dilihat dari deskripsi hasil penelitian tentang Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Informasi laporan keuangan Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi, dapat dilihat dari:

1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Kualitas informasi laporan keuangan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pemakai agar dapat dipahami tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Hasil tingkat capaian responden kualitas informasi laporan keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13
Tingkat Capaian Responden Kualitas Informasi Laporan Keuangan

No	Item Pernyataan	Mean	TCR %	Kategori
1	Pelaksanaan realisasi anggaran di unit kerja/satker sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan	4,68	93,56	Sangat Baik
2	Apakah bidang pendidikan di unit kerja/satker sesuai dengan bidang pekerjaan saat ini	4,21	84,14	Baik
3	Kualitas informasi keuangan dapat meberikan kontribusi positif terhadap program kerja yang akan disusun pada periode mendatang	4,36	87,13	Baik
4	Penyajian informasi keuangan yang berkualitas telah dibantu oleh aplikasi komputer yang baik	4,15	82,99	Baik

5	Keuangan yang disajikan memberikan banyak informasi yang bermanfaat buat pegawai pemerintah dalam mengetahui kinerja di unit kerja/satker	4,21	84,14	Baik
6	Penyajian laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di unit kerja/satker dapat diterapkan secara mudah dan konsisten	4,48	89,66	Baik
7	Pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	4,20	83,91	Baik
8	Wewenang untuk memahami informasi laporan keuangan di unit kerja/satker hanya diberikan kepada orang tertentu saja	4,23	84,60	Baik
9	Pekerjaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kerjasama antar rekan sekerja dalam menyelesaikan pekerjaan	4,55	91,03	Sangat Baik
10	Informasi keuangan memberikan informasi yang lengkap kepada stockholder	3,90	77,93	Cukup Baik
11	Informasi keuangan dapat memberikan keputusan yang lebih akurat dalam penyusunan anggaran di periode yang akan datang	3,84	76,78	Cukup Baik
12	Informasi yang diberikan sesuai dengan kebijakan telah disahkan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan/program	4,47	89,43	Baik
13	Standar Akuntansi Pemerintah yang diterapkan pada lembaga di unit kerja/satker tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga tempat bekerja	4,43	88,51	Baik
14	Penyusunan laporan keuangan dapat dipahami dengan mudah karena telah diadakannya pelatihan/kursus dalam mengoperasikan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah di unit kerja/satker	4,23	84,60	Baik
15	Pelaksanaan prosedur untuk menerbitkan informasi kualitas keuangan telah disusun secara sederhana, tidakbertele-tele, jelas dan fleksibel	4,40	88,05	Baik
	MEAN	4,29	85,76	Baik

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

Berdasarkan Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa variabel Kualitas informasi laporan keuangan, item pernyataan nomor 1 dengan tingkat capaian responden tertinggi yaitu 93,56%, sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu pernyataan nomor 11 yaitu 76,78%. Ini berarti penyajian informasi laporan keuangan bagi instansi sangat dibutuhkan bagi pemakai laporan keuangan, sedangkan informasi yang dihasilkan dalam kualitas laporan keuangan SKPD

belum memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah. Secara keseluruhan kualitas informasi laporan keuangan dapat dikategorikan hanya baik dengan TCR 85,76%.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₁)

Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil tingkat capaian responden SAP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14
Tingkat Capaian Responden Penerapan SAP

No	Item Pernyataan	Mean	TCR %	Kategori
1	Pelaksanaan realisasi anggaran di unit kerja/satker sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan	4,37	87,36	Baik
2	Apakah bidang pendidikan di unit kerja/satker sesuai dengan bidang pekerjaan saat ini	4,23	84,60	Baik
3	Kualitas informasi keuangan dapat memberikan kontribusi positif terhadap program kerja yang akan disusun pada periode mendatang	4,05	80,92	Baik
4	Penyajian informasi keuangan yang berkualitas telah dibantu oleh aplikasi komputer yang baik	4,34	86,90	Baik
5	Keuangan yang disajikan memberikan banyak informasi yang bermanfaat buat pegawai pemerintah dalam mengetahui kinerja di unit kerja/satker	4,28	85,52	Baik
6	Penyajian laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di unit kerja/satker dapat diterapkan secara mudah dan konsisten	4,36	87,13	Baik
7	Pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	4,20	83,91	Baik
8	Wewenang untuk memahami informasi laporan keuangan di unit kerja/satker hanya diberikan kepada orang tertentu saja	4,25	85,06	Baik
9	Pekerjaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kerjasama antar rekan sekerja dalam menyelesaikan pekerjaan	4,21	84,14	Baik
10	Informasi keuangan memberikan informasi yang lengkap kepada stockholder	4,07	81,38	Baik

11	Informasi keuangan dapat memberikan keputusan yang lebih akurat dalam penyusunan anggaran di periode yang akan datang	3,64	72,87	Cukup Baik
12	Informasi yang diberikan sesuai dengan kebijakan telah disahkan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan/program	4,45	88,97	Baik
13	Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan pada lembaga di unit kerja/satker tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga tempat bekerja	4,25	85,06	Baik
14	Penyusunan laporan keuangan dapat dipahami dengan mudah karena telah diadakannya pelatihan/kursus dalam mengoperasikan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan di unit kerja/satker	4,06	81,15	Baik
15	Pelaksanaan prosedur untuk menerbitkan informasi kualitas keuangan telah disusun secara sederhana, tidak bertele-tele, jelas dan fleksibel	3,43	68,51	Cukup Baik
	MEAN	4,14	82,90	Baik

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

Berdasarkan Tabel 14 di atas, dapat dilihat bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah item nomor 12 dengan tingkat capaian responden tertinggi yaitu 88,97%. Sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu pertanyaan nomor 15 yaitu 68,51%. Berarti dalam penerapan SAP instansi membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi. Sedangkan dalam penerapan SAP instansi ini kurang melaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan yang sesuai dengan SAP. Secara keseluruhan penerapan SAP dapat dikategorikan hanya dengan Baik dengan TCR 82,90%.

3. Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (X₂)

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga

diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Hasil tingkat capaian responden Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15
Tingkat Capaian Responden Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

No	Item Pernyataan	Mean	TCR %	Kategori
1	Ruang lingkup dan frekuensi pengawasan telah mencakup pengendalian intern, keuangan, asset, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan tahap kegiatan yang diawasi.	3,98	79,54	Cukup Baik
2	Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia pada unit kerja/satker.	3,83	76,55	Cukup Baik
3	Tim pengawasan dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang berkewenangan dan pengalaman memadai.	4,07	81,38	Baik
4	Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan	3,95	79,08	Cukup Baik
5	Laporan evaluasi selalu disajikan kendala dan rekonmendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.	4,08	81,61	Baik
6	Penanggungjawab kegiatan telah menyusun pedoman kegiatan sebagai acuan dalam masing-masing kegiatan sebagai sarana untuk penilaian risiko	3,85	77,01	Cukup Baik
7	Pengawasan dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan	2,67	53,33	Kurang Baik
8	kegiatan pengawasan telah menghasilkan output berupa laporan hasil pengawasan.	2,71	54,25	Kurang Baik
9	Pimpinan instansi telah menunjuk tim atau tugas khusus untuk mengevaluasi tindaklanjuthasil audit dan hasil reuiu lainnya	2,94	58,85	Kurang Baik
10	Hasil pelaksanaan pengawasan segera dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan instansi pemerintah atau pemberi tugas.	3,06	61,15	Kurang Baik
11	Hasil pelaksanaan evaluasi yang diberikan atas aktivitas pengawasan segera diberitahukan kepada pegawai.	3,02	60,46	Kurang Baik

12	Hasil pengawasan dilaporkan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	2,92	58,39	Kurang Baik
13	Kegiatan evaluasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan	2,66	53,10	Kurang Baik
14	Evaluasi dilakukan pada saat adanya kegiatan misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemakaran atau pencutian instansi pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran.	2,59	51,72	Kurang Baik
15	Kegiatan evaluasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan	2,69	53,79	Kurang Baik
	MEAN	3,27	65,35	Cukup Baik

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

Dari tabel 15 di atas, dapat dilihat bahwa variabel Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dapat dikatakan tingkat capaian responden dikategorikan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada item pernyataan nomor 5 yaitu dengan tingkat capaian responden tertinggi 81,61%, sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu item pernyataan nomor 14 dengan tingkat capaian responden sebesar 51,72%. Hal ini berarti bahwa Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dengan baik sesuai prosedur yang benar dapat meningkatkan pekerjaan yang lebih baik bagi instansi. Secara keseluruhan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dikategorikan cukup baik dengan TCR 65,35%.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji kualitas kuesioner yang diedarkan telah melalui tahap uji coba kepada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi UNP sebanyak 30 orang. Hasil uji coba kuesioner ini telah dipaparkan pada bab III menjelaskan pertanyaan yang valid untuk variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), variabel Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (X2) dan variabel kualitas informasi

laporan keuangan (Y) dinyatakan valid semuanya, maka semua item yang valid akan diikutsertakan dalam penyebaran angket kepada responden penelitian ini.

Berdasarkan hasil tersebut tidak ada keraguan peneliti untuk menyebarkan angket kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi sebanyak 87 responden yang merupakan responden yang akan diteliti. Kualitas kuesioner dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Uji Validitas Data

Uji validitas pada masing-masing variabel yang diteliti dapat dilihat sebagai berikut:

a. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₁)

Uji validitas variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16
Hasil Pengujian Variabel Penerapan SAP (X₁)

Item	Faktor Loading	Keterangan
X1.1	0,525(**)	Valid
X1.2	0,706(**)	Valid
X1.3	0,650(**)	Valid
X1.4	0,413(**)	Valid
X1.5	0,308(**)	Valid
X1.6	0,620(**)	Valid
X1.7	0,622(**)	Valid
X1.8	0,528(**)	Valid
X1.9	0,635(**)	Valid
X1.10	0,525(**)	Valid
X1.11	0,578(**)	Valid
X1.12	0,548(**)	Valid
X1.13	0,544(**)	Valid
X1.14	0,721(**)	Valid
X1.15	0,529(**)	Valid

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 16 di atas, dapat dilihat, *corrected item-total correlation* dari masing-masing item pertanyaan pada variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan valid, karena Nilai r tabel diperoleh dari tabel *statistik product moment* pada derajat bebas dengan alpha 5% lebih besar dari 0,203. Artinya angket SAP mampu untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur, sehingga jawaban pegawai terhadap angket yang diedarkan bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

b. Variabel Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (X2)

Uji validitas variabel Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17
Hasil Pengujian Variabel PIP Daearah (X2)

Item	Faktor Loading	Keterangan
X2.1	0,511(**)	Valid
X2.2	0,410(**)	Valid
X2.3	0,469(**)	Valid
X2.4	0,409(**)	Valid
X2.5	0,308(**)	Valid
X2.6	0,579(**)	Valid
X2.7	0,773(**)	Valid
X2.8	0,796(**)	Valid
X2.9	0,598(**)	Valid
X2.10	0,514(**)	Valid
X2.11	0,442(**)	Valid
X2.12	0,536(**)	Valid
X2.13	0,704(**)	Valid
X2.14	0,575(**)	Valid
X2.15	0,545(**)	Valid

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 17 di atas, dapat dilihat, *corrected item-total correlation* dari masing-masing item pertanyaan pada variabel Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Daerah dinyatakan valid, karena nilai r tabel diperoleh dari tabel *statistik product moment* pada derajat bebas dengan alpha 5% lebih

besar dari 0,203. Artinya angket PIP Daerah mampu untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur, sehingga jawaban pegawai terhadap angket yang diedarkan bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

c. Variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Uji validitas variabel kualitas informasi laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Hasil Pengujian Variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Item	Faktor Loading	Keterangan
Y1	0,563(**)	Valid
Y2	0,407(**)	Valid
Y3	0,695(**)	Valid
Y4	0,791(**)	Valid
Y5	0,661(**)	Valid
Y6	0,672(**)	Valid
Y7	0,742(**)	Valid
Y8	0,785(**)	Valid
Y9	0,658(**)	Valid
Y10	0,296(**)	Valid
Y11	0,319(**)	Valid
Y12	0,637(**)	Valid
Y13	0,463(**)	Valid
Y14	0,730(**)	Valid
Y15	0,686(**)	Valid

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 18 di atas, dapat dilihat, *corrected item-total correlation* dari masing-masing item pertanyaan pada variabel kualitas informasi laporan keuangan (Y) dinyatakan valid, karena Nilai r tabel diperoleh dari tabel *statistik product moment* pada derajat bebas dengan alpha 5% lebih besar dari 0,203. Artinya angket kualitas informasi laporan keuangan mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga jawaban

pegawai terhadap angket yang diedarkan bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

2. Uji Reliabilitas Variabel

Uji reliabilitas variabel digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur keandalan kuesioner yaitu sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan dan tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang. Pengujian *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji tingkat keandalan (*Reliable*) dari masing-masing angket variabel. Adapun hasil uji reliabilitas penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 19
Hasil Uji Reliability Statistics Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	Keterangan
X1	0,841	0,848	15	<i>Reliable</i>
X2	0,830	0,832	15	<i>Reliable</i>
Y	0,875	0,878	15	<i>Reliable</i>

Sumber Data: Pengolahan Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 19, maka nilai *Cronbach Alpha* pada variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) sebesar 0,841, variabel Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (X2) sebesar 0,830 dan variabel kualitas informasi laporan keuangan 0,875 (Y) dinyatakan *Reliable* (handal), karena *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,8. Artinya seluruh kuesioner yang digunakan sangat baik atau handal untuk pengukuran selanjutnya.

E. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi Suatu model regresi dikatakan linier harus melalui uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Menurut Umar (2008:175) terdapat tiga uji klasik, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan adalah uji *one Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat signifikansi residual normal sebagai berikut:

Tabel 20
Hasil Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	7,04548744
Most Extreme Differences	Absolute	,149
	Positive	,102
	Negative	-,149
Kolmogorov-Smirnov Z		1,392
Asymp. Sig. (2-tailed)		,641

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Berdasarkan tabel 20 di atas, maka diperoleh nilai signifikansi (*Asym.Sig2-tailed*) sebesar 0,641 besar dari 0,05. Artinya residual terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolonieritas kedua variabel. Uji multikolonieritas dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi, jika VIF kurang dari 10, maka variabel tersebut tidak mempunyai persoalan

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Adapun hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 21
Hasil Uji Multikolinearitas

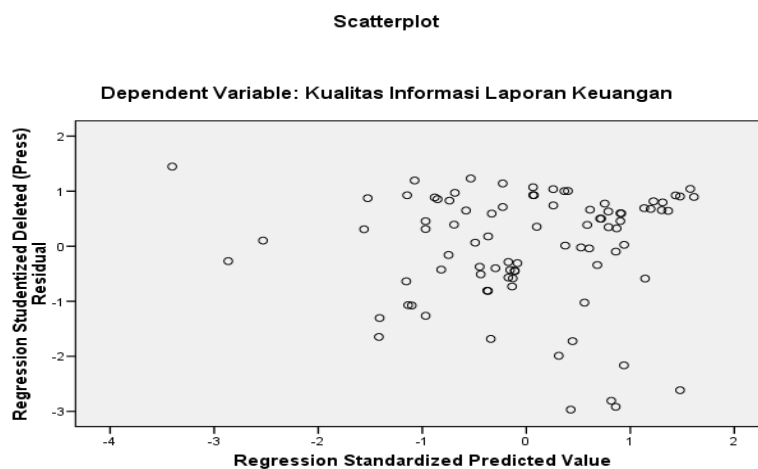
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,999	1,001
	Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	,999	1,001

a Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel 21, maka dapat diketahui nilai VIF kedua variabel tersebut kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*standardized* (Ghozali, 2001). Uji heteroskedastisitas menghasilkan grafik pola penyebaran titik (*scatterplot*) seperti tampak pada Gambar berikut:



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas “Scatterplot”

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

F. Teknik Analisa Data

1. Analisa Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda menjelaskan pengaruh antara variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (X2) secara bersama-sama dengan variabel kualitas informasi laporan keuangan (Y) sebagai berikut:

Tabel 22
Hasil Analisis Linear Berganda (Coefficients(a))

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	50,515	7,537		
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,211	,102	,220	2,069
	Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	,614	,277	,320	3,184

a Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pada tabel koefisien 22 dapat dilihat bahwa nilai konstanta (a) adalah 50,515 sedangkan koefisien regresi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (bX1) sebesar 0,211 dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (bX2) sebesar 0,614. Hasil dari analisis linear berganda tersebut dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 50,515 + 0,211X_1 + 0,614X_2 + 7,537$$

Dari persamaan di atas dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 50,515 artinya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah secara bersamaan nilainya adalah 0 (nol), maka kualitas informasi laporan keuangan nilainya 50,515.
2. Koefisien regresi variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,211 artinya jika Pengawasan Intern Pemerintah Daerah nilainya tetap, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan kualitas informasi laporan keuangan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,211, demikian pula dalam keadaan sebaliknya. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan kualitas informasi laporan keuangan, artinya semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, maka semakin meningkat kualitas informasi laporan keuangan.
3. Koefisien regresi variabel Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebesar 0,614 artinya jika variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tetap, maka penerapan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan kualitas informasi laporan keuangan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,614, demikian pula dalam keadaan sebaliknya. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan, artinya semakin baik Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, maka semakin meningkat kualitas informasi laporan keuangan.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah secara simultan terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23
Hasil Analisis Determinan (Model Summary(b))

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,620(a)	,449	,226	7,12887

a Predictors: (Constant), Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel 23 diatas diperoleh R sebesar 0,620 yaitu terdapat hubungan yang kuat positif antara variabel independen (penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah) dengan variabel dependen (kualitas informasi laporan keuangan) dan nilai koefisien determinansi atau R^2 (R Square) sebesar 0,449 atau (44,9%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase hubungan pengaruh variabel independen seraca bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen sebesar 44,9%, sisanya 55,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk model penelitian ini.

3. Uji F

Hasil perhitungan regresi secara bersama-sama antara variabel penerapan Standar Akuntansi dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan uji F sebagai berikut:

Tabel 24
Uji F (ANOVA(b))

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218,044	2	109,022	4,145	,001(a)
	Residual	4268,945	84	50,821		
	Total	4486,989	86			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel 24 diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,145 dengan signifikan 0,001 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05). Artinya bahwa penerapan Standar Akuntansi dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

4. Uji Hipotesis

Uji t statistik (t-test) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap terikatnya. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji hipotesis setiap variabel dapat menggunakan Uji t, untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Berdasarkan tabel 22 dapat dilihat pengujian pada masing-masing sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1 (H1)

Pengujian hipotesis 1 menjelaskan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai koefisien regresi (beta) adalah 0,211. dengan nilai t sebesar 2,069 dan tingkat signifikansi 0,042 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05), berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan

b. Pengujian Hipotesis 2 (H2)

Pengujian hipotesis 2 menjelaskan bahwa variabel Pengawasan Intern Pemerintah Daerah memiliki nilai koefisien regresi (beta) adalah 0,614 dengan nilai t sebesar 3,184 dan tingkat signifikan 0,004 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05) berarti Pengawasan Intern Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

G. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengolahan data dengan program SPSS 20 dapat diketahui bahwa:

1. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Kota Bukittinggi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa terdapatnya pengaruh signifikan

antara penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Hasil ini didukung oleh penelitian Santoso (2008) yang mengemukakan hasil bahwa secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penjelasan di atas, menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada akuntansi pemerintah, karena sudah diterapkannya pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia yang sesuai dengan SAP. Standar tersebut sudah dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada 13 Juni 2005. Hal tersebut merupakan jawaban pemerintah atas tuntutan akan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan agar tujuan akuntansi pemerintah dapat diaplikasikan dengan baik. Adapun tujuan akuntansi pemerintah menurut Nordiawan (2006:7) adalah 1) Tujuan pertanggungjawaban, 2) Tujuan manajerial, 3) Tujuan pengawasan.

2. Pengaruh Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Kota Bukittinggi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa pengaruh signifikan antara

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuannya adalah mewujudkan *good governance* dan *clean government*, maka pengawasan sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Penjelasan tersebut juga didukung oleh pendapat Cahyat (2004) bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional.

Pengawasan intern merupakan proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penjelasan tentang ini diperkuat oleh pendapat Mulyadi (2001:163) yang mengatakan bahwa Pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

BAB V

PENUTUP

Pada BAB Penutup merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan perumusan, maka ditemukan hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa:

1. Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Dengan demikian hipotesa pertama yang menyatakan adanya pengaruh penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan dapat diterima dengan nilai t sebesar 2,069 atau tingkat signifikansi 0,042 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05).
2. Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Dengan demikian hipotesa kedua diterima, yang menyatakan adanya pengaruh pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dapat diterima dengan nilai t sebesar 3,184 atau tingkat signifikan 0,004 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disimpulkan, maka peneliti menyarankan kepada:

1. Hendaknya pegawai yang memiliki tanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dapat memberikan informasi sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena hal tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintah terhadap terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD Kota Bukittinggi.
2. Hendaknya Pengawasan Intern Daerah SKPD Kota Bukittinggi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana disusun sebelumnya, agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berkualitas kepada pemakai laporan keuangan. Hal ini telah dibuktikan secara empiris bahwa terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan Intern Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD Kota Bukittinggi.
3. Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai kualitas informasi laporan keuangan. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memotivasi penelitian lain untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Revisi VI)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arif, Bachtiar. (2002). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Bodnar, George HI willian S. Hopwood, (2006). *Accounting Information System, Sevent Edition*, USA.
- Bastian, Indra. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Baridwan, Zaki. (2000). *Intermediate Accounting*. Edisi Tujuh. Yogyakarta: BPF
- Blanchet. (2000). *On The Equations of Motion of Point-Particle Binaries at The Third post-Newtonian Order*, Phys. Lett. A 271.
- Cahyat, A. (2004). *Sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah*. Volume 2 No. 2, November.
- Financial Accounting Standard Boards. (2010). “*Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Qualitative Characteristics of Accounting Information*”, Norwalk. (penganti SFAC No 2 tahun 1980)
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB)*. (2009). Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: *Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk
- Santoyo, Gondidoyoto. (2009). *Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi*, Mitra. Wacana Media: Jakarta.
- Halim, Abdussl. (2006). *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2, November.
- Halim, Abdul. (2005). *Analisis Investasi*. Salemba Empat, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. (2006). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hanafi Mamduh & Abdul Halim. (2002). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Dua , Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Hilton, Welsch. et al. (2000). *Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Jakarta: Salemba Empat
- Hindriani. (2012). Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun): *Jurnal Vol. 15, No. 3. ISSN : 1411-0199*
- Horngren, C.T. et al. (2003). *Cost Accounting A Manajerial Emphasis twelfth edition*. Stanford University
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun (2004) menjadi Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga – Indonesia.
- Kuntadi (2009), *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Masmudi. (2003). ‘Pengukuran Kinerja Proyek Irigasi pada Sub Dinas Pengairan PUPP Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002’, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, vol.03, no. 01, pp. 17-30
- Masngudi, dan Noor, Salim. (2012) *Metodologi Penelitian untuk ekonomi dan bisnis*, Jakarta: University Press
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan: Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyana, Deddy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda
- Munawir, S. (2002). *Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*. Edisi Revisi. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso. (2008) yang berjudul tentang Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud urip santoso@home.unpar.ac.id

- Situmorang. (1994). *Reformasi Pelayanan Publik*. Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sudjana Nana. (2009). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono (2005). *Statistik Untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 for Windows*, Alfabeta, Bandung.
- Susmanto, Azhar. (2008). *Sistem informasi Akuntansi, Struktur-Pengendalian Resiko-Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sundjaja, R.S., dan Barlian. I. (2001). *Manajemen Keuangan 2*. Jakarta: Literata Media
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan (Edisi III)*. Yogyakarta: BPFE
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2008). *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Payanta. (2006). *Pengaruh Kualitas Auditor, Independensi dan Opini Audit Terhadap Kualitas Laporan keuangan*". Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 6, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008
- Priyatno, dwi, (2008), *Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*, Yogyakarta: Penerbit media kom
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Umar Husein, (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada

Widodo, Budiharto. (2004). *Interfacing Komputer dan Mikrokontroler*. Jakarta:
Elex Media Komputindo

Wilson. 2001. Prioritizing global conservation efforts. *Nature*, 440(16):337-340

Wilkinson, Joseph. W, 2000, *System Accounting and Information*, Edisi Tiga,
penerjemah oleh Marianus Sinaga, Jakarta : Bina Putra Alam.

Yuliani (2010). pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda
Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3. No. 2. Juli 2010 Hal. 206-
220

www.bpkri.go.id access 17-20-2012

SURAT ANGKET PENELITIAN

Padang, 1 Desember 2013

**Kepada Yth,
Saudara/I Mahasiswa FE UNP**

Hormat Saya,

Perkenankan saya menyampaikan kepada saudara/i, bahwa saya bermaksud untuk mengadakan penelitian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Universitas Negeri Padang.

Untuk itu terlampir bersama ini seperangkat angket/kuesioner uji coba penelitian sebelum angket ini layak diedarkan kepada responden. Kiranya Saudara/i dengan bermurah hati dapat mengisi angket/kuesioner. Informasi yang Saudara/i berikan dapat membantu penelitian ini.

Atas bantuan dan kerja sama Saudara/i berikan saya aturkan terima kasih.

Wassalam
tto

Yosi Juita
Peneliti

ANGKET UJI COBA PENELITIAN

No. Responden: (diisi oleh peneliti)
--

Judul Penelitian:

”PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN INTERN PERMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA BUKITTINGGI”

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Saudara/i untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan.
2. Berilah tanda silang (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh sebab itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.
4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara/i partisipasi guna mensukseskan penelitian ini.

DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN

Tanggal Pengisian :
Jenis Kelamin :

PETUNJUK PENGISIAN

Terimakasih Saudara/i, telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda silang (X).

Jika menurut Saudara/i tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/pernyataan. Skor jawaban dari pertanyaan/pernyataan sebagai berikut :

Keterangan	(TS) Tidak Setuju	(KS) Kurang Setuju	(CS) Cukup Setuju	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

1. KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	CS	S	SS
Relevan						
1	Pelaksanaan realisasi anggaran di unit kerja/satker sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan					
2	Apakah bidang pendidikan di unit kerja/satker sesuai dengan bidang pekerjaan saat ini					
Memiliki manfaat umpan bali						
3	Kualitas informasi keuangan dapat memberikan kontribusi positif terhadap program kerja yang akan disusun pada periode mendatang					

Memiliki manfaat prediktif						
4	Penyajian informasi keuangan yang berkualitas telah dibantu oleh aplikasi komputer yang baik					
5	Keuangan yang disajikan memberikan banyak informasi yang bermanfaat buat pegawai pemerintah dalam mengetahui kinerja di unit kerja/satker					
Tepat Waktu						
6	Penyajian laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di unit kerja/satker dapat diterapkan secara mudah dan konsisten					
7	Pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan					
Kesempatan untuk tumbuh						
8	Wewenang untuk memahami informasi laporan keuangan di unit kerja/satker hanya diberikan kepada orang tertentu saja					
9	Pekerjaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kerjasama antar rekan sekerja dalam menyelesaikan pekerjaan					
Lengkap						
10	Informasi keuangan memberikan informasi yang lengkap kepada stockholder					
11	Informasi keuangan dapat memberikan keputusan yang lebih akurat dalam penyusunan anggaran di periode yang akan datang					
Andal						
12	Informasi yang diberikan sesuai dengan kebijakan telah disahkan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan/program					
Dapat dibandingkan						
13	Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan pada lembaga di unit kerja/satker tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga tempat bekerja					
Dapat dipahami						
14	Penyusunan laporan keuangan dapat dipahami dengan mudah karena telah diadakannya pelatihan/kursus dalam					

	mengoperasikan pedoman sistem akuntansi pemerintah di unit kerja/satker					
15	Pelaksanaan prosedur untuk menerbitkan informasi kualitas keuangan telah disusun secara sederhana, tidak bertele-tele, jelas dan fleksibel					

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (X₁)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	CS	S	SS
Akuntabilitas						
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada lembaga anda dapat dipahami secara mudah					
2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan memberikan kualitas informasi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.					
3	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat menjaga keakuratan pelaksanaan laporan keuangan di unit kerja/satker					
4	Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan.					
Manajemen						
5	Pimpinan selalu memberikan petunjuk pekerjaan secara teknis					
6	Pimpinan menetapkan kebijakan tertulis guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
7	Pimpinan menetapkan prosedur tertulis (SOP) di unit kerja/satker yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan					
8	Pimpinan selalu memberikan pengawasan agar pegawai menyuun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)					
9	Pimpinan selalu memberikan penjelasan kepada pegawai tentang pedoman SAP yang tidak dipahami, serta menindaklanjuti ketidakpahaman pada kegiatan pelatihan					

Transparasi						
10	Kebijakan telah disosialisasikan /dikomunikasikan kepada personil di unit kerja/satker.					
11	TOR yang di buat telah menguraikan tahapan kegiatan yang akan di laksanakan dan di lengkapi dengan alokasi sumber daya (SDM,keuangan dan fisik)					
12	Informasi laporan keuangan yang telah di Audit di publikasikan secara resmi					
Keseimbangan Antar Generasi						
13	Pegawai selalu mendapatkan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP secara rutin					
14	Pelatihan yang diberikan kepada pegawai memberikan menekankan pada penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP)					
15	Pegawai memiliki prosedur kegiatan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)					

3. PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (X₂)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	CS	S	SS
Lingkungan Pengawasan						
1	Ruang lingkup dan frekuensi pengawasan telah mencakup pengendalian intern, keuangan, asset , pelaksanaan kegiatan dan pemantauan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan tahap kegiatan yang diawasi.					
2	Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia pada unit kerja/satker.					
3	Tim pengawasan dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang berkewenangan dan pengalaman memadai.					

Penaksiran Resiko						
4	Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan					
5	Laporan evaluasi selalu disajikan kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.					
6	Penanggungjawab kegiatan telah menyusun pedoman kegiatan sebagai acuan dalam masing-masing kegiatan sebagai sarana untuk penilaian risiko					
Aktivitas Pengawasan						
7	Pengawasan dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan					
8	kegiatan pengawasan telah menghasilkan output berupa laporan hasil pengawasan.					
9	Pimpinan instansi telah menunjuk tim atau tugas khusus untuk mengevaluasi tindaklanjuthasil audit dan hasil reviu lainnya					
10	Pelaksanaan pengawasan telah berjalan baik dan efektif					
Informasi dan Komunikasi						
11	Hasil pelaksanaan pengawasan segera dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan instansi pemerintah atau pemberi tugas.					
12	Hasil pelaksanaan evaluasi yang diberikan atas aktivitas pengawasan segera diberitahukan kepada pegawai.					
13	Hasil pengawasan dilaporkan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi					
Pemantauan						
14	Kegiatan evaluasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan					
15	Evaluasi dilakukan pada saat adanya kegiatan misalnya perubahan besar dalam					

rencana atau stretegi manajemen, pemakaran atau pencutian instansi pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran.					
--	--	--	--	--	--

=====TERIMA KASIH=====

SURAT ANGKET PENELITIAN

Bukittingi, 1 Desember 2013

**Kepada Yth,
Bapak/ Ibu Pegawai Negeri Sipil SKPD Kota Bukittinggi**

Hormat Saya,

Perkenankan saya menyampaikan kepada Bapak/Ibu/sdr, bahwa saya bermaksud untuk mengadakan penelitian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Universitas Negeri Padang.

Untuk itu terlampir bersama ini seperangkat angket/kuesioner penelitian. Kiranya Bapak/ Ibu dengan bermurah hati dapat mengisi angket/kuesioner sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu/sdr rasakan atau alami sebelumnya. Informasi yang Bapak/ Ibu berikan tidak ada kaitannya dengan penilaian pekerjaan Bapak/Ibu/sdr. Begitupun juga kerahasiaan informasi yang Bapak/ Ibu berikan akan dijaga sepenuhnya.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu/sdr berikan saya aturkan terima kasih.

Wassalam
tto

Yosi Juita
Peneliti

ANGKET PENELITIAN

<p>No. Responden: (diisi oleh peneliti)</p>
--

Judul Penelitian:

”PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN INTERN PERMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA BUKITTINGGI”

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan.
2. Berilah tanda silang (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh sebab itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.
4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr atas partisipasi guna mensukseskan penelitian ini.

DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama Instansi :

Tanggal Pengisian :

JENIS KELAMIN	1. () LAKI-LAKI 2. () PREMPUAN
UMUR	1. () >20 TAHUN 2. () 31-40 TAHUN 3. () 41-50 TAHUN 4. () >50 TAHUN
PENDIDIKAN TERAKHIR	1. () SLTA 2. () D3 3. () S1 4. () > S2
MASA KERJA	1. () < 5 TAHUN 2. () 6 – 10 TAHUN 3. () 11 – 15 TAHUN 4. () 15 TAHUN
JABATAN	1. () Kepala Badan/Dinas/ Instansi 2. () Sekretaris/Kabid/Kabag 3. () Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/ Kasie
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:	1. () Ekonomi / Akuntansi 2. () Hukum 3. () Teknik 4. () Sosial 5. () Lainnya

PETUNJUK PENGISIAN

Terimakasih Bapak/Ibu, telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda silang (X).

Jika menurut Bapak/Ibu/Sdr tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/pernyataan. Skor jawaban dari pertanyaan/pernyataan sebagai berikut :

Keterangan	(TS) Tidak Setuju	(KS) Kurang Setuju	(CS) Cukup Setuju	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

1. KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	CS	S	SS
Relevan						
1	Pelaksanaan realisasi anggaran di unit kerja/satker sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan					
2	Apakah bidang pendidikan di unit kerja/satker sesuai dengan bidang pekerjaan saat ini					
Memiliki manfaat umpan balik						
3	Kualitas informasi keuangan dapat memberikan kontribusi positif terhadap program kerja yang akan disusun pada periode mendatang					
Memiliki manfaat prediktif						
4	Penyajian informasi keuangan yang berkualitas telah dibantu oleh aplikasi komputer yang baik					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	CS	S	SS
5	Keuangan yang disajikan memberikan banyak informasi yang bermanfaat buat pegawai pemerintah dalam mengetahui kinerja di unit kerja/satker					
Tepat Waktu						
6	Penyajian laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di unit kerja/satker dapat diterapkan secara mudah dan konsisten					
7	Pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan					
Kesempatan untuk tumbuh						
8	Wewenang untuk memahami informasi laporan keuangan di unit kerja/satker hanya diberikan kepada orang tertentu saja					
9	Pekerjaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kerjasama antar rekan sekerja dalam menyelesaikan pekerjaan					
Lengkap						
10	Informasi keuangan memberikan informasi yang lengkap kepada stockholder					
11	Informasi keuangan dapat memberikan keputusan yang lebih akurat dalam penyusunan anggaran di periode yang akan datang					
Andal						
12	Informasi yang diberikan sesuai dengan kebijakan telah disahkan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan/program					
Dapat dibandingkan						
13	Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan pada lembaga di unit kerja/satker tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga tempat bekerja					
Dapat dipahami						
14	Penyusunan laporan keuangan dapat dipahami dengan mudah karena telah diadakannya					

	pelatihan/kursus dalam mengoperasikan pedoman sistem akuntansi pemerintah di unit kerja/satker					
15	Pelaksanaan prosedur untuk menerbitkan informasi kualitas keuangan telah disusun secara sederhana, tidak bertele-tele, jelas dan fleksibel					

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (X₁)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	CS	S	SS
Akuntabilitas						
1	Penerapan sistem akuntansi pemerintah pada lembaga anda dapat dipahami secara mudah					
2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan memberikan kualitas informasi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.					
3	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat menjaga keakuratan pelaksanaan laporan keuangan di unit kerja/satker					
4	Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan di unit kerja/satker					
Manajemen						
5	Pimpinan selalu memberikan petunjuk pekerjaan secara teknis					
6	Pimpinan menetapkan kebijakan tertulis guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
7	Pimpinan menetapkan prosedur tertulis (SOP) di unit kerja/satker yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan					
8	Pimpinan selalu memberikan pengawasan agar pegawai menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	CS	S	SS
9	Pimpinan selalu memberikan penjelasan kepada pegawai tentang pedoman SAP yang tidak dipahami, serta menindaklanjuti ketidakpahaman pada kegiatan pelatihan					
Transparansi						
10	Kebijakan telah disosialisasikan/dikomunikasikan kepada personil di unit kerja/satker.					
11	TOR yang di buat telah menguraikan tahapan kegiatan yang akan di laksanakan dan di lengkapi dengan alokasi sumber daya (SDM,keuangan dan fisik)					
12	Informasi laporan keuangan yang telah di Audit di publikasikan secara resmi					
Keseimbangan Antar Generasi						
13	Pegawai selalu mendapatkan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP secara rutin					
14	Pelatihan yang diberikan kepada pegawai memberikan menekankan pada penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP)					
15	Pegawai memiliki prosedur kegiatan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)					

3. PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (X2)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	CS	S	SS
Lingkungan Pengawasan						
1	Ruang lingkup dan frekuensi pengawasan telah mencakup pengendalian intern, keuangan, asset, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan tahap kegiatan yang diawasi.					

2	Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia pada unit kerja/satker.					
3	Tim pengawasan dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang berwenangan dan pengalaman memadai.					
Penaksiran Resiko						
4	Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan					
5	Laporan evaluasi selalu disajikan kendala dan rekonmendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.					
6	Penanggungjawab kegiatan telah menyusun pedoman kegiatan sebagai acuan dalam masing-masing kegiatan sebagai sarana untuk penilaian risiko					
Aktivitas Pengawasan						
7	Pengawasan dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan					
8	kegiatan pengawasan telah menghasilkan output berupa laporan hasil pengawasan.					
9	Pimpinan instansi telah menunjuk tim atau tugas khusus untuk mengevaluasi tindaklanjuthasil audit dan hasil reuiu lain.					
10	Pelaksanaan pengawasan telah berjalan baik dan efektif					
Informasi dan Komunikasi						
11	Hasil pelaksanaan pengawasan segera dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan instansi pemerintah atau pemberi tugas.					
12	Hasil pelaksanaan evaluasi yang diberikan atas aktivitas pengawasan segera diberitahukan kepada pegawai.					
13	Hasil pengawasan dilaporkan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi					
Pemantauan						
14	Kegiatan evaluasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan					

15	Evaluasi dilakukan pada saat adanya kegiatan misalnya perubahan besar dalam rencana atau stretegi manajemen, pemakaran atau pencutian instansi pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran.					
----	--	--	--	--	--	--

=====TERIMA KASIH=====

Reliability Statistics X1

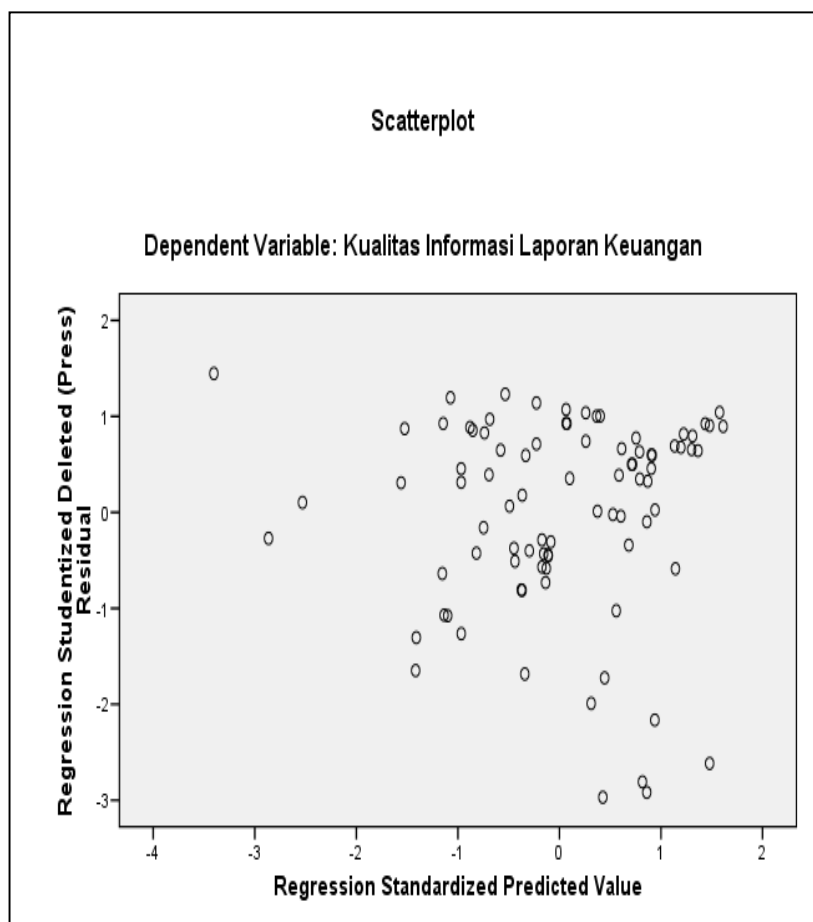
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,841	0,848	15

Reliability Statistics X2

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,83	0,832	15

Reliability Statistics Y

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,875	0,878	15



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	50,515	7,537		6,703	,000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,211	,102	,220	2,069	,042
	Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	,614	,277	,320	3,184	,004

a Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,620(a)	,449	,226	7,12887

a Predictors: (Constant), Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218,044	2	109,022	4,145	,001(a)
	Residual	4268,945	84	50,821		
	Total	4486,989	86			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Y9	Pearson Correlation	,379(**)	0,113	,457(**)	,317(**)	,474(**)	,441(**)	,430(**)	,458(**)	1	0,092	0,143	,493(**)	,410(**)	,366(**)	,455(**)	,658(**)
	Sig. (2-tailed)	0	0,298	0	0,003	0	0	0	0		0,395	0,187	0	0	0	0	0
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Y10	Pearson Correlation	0,027	0,051	0,101	0,17	0,176	0,118	0,125	0,111	0,092	1	,465(**)	-0,049	-0,019	0,084	0,175	,296(**)
	Sig. (2-tailed)	0,804	0,636	0,351	0,115	0,103	0,275	0,25	0,307	0,395		0	0,65	0,858	0,439	0,104	0,005
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Y11	Pearson Correlation	0,075	0,095	0,084	0,183	0,113	0,054	0,095	0,132	0,143	,465(**)	1	-0,022	0,087	0,062	,215(*)	,319(**)
	Sig. (2-tailed)	0,489	0,383	0,437	0,089	0,298	0,621	0,38	0,222	0,187	0		0,839	0,423	0,571	0,045	0,003
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Y12	Pearson Correlation	,478(**)	,415(**)	,359(**)	,479(**)	,479(**)	,305(**)	,435(**)	,452(**)	,493(**)	-0,049	-0,022	1	0,186	,474(**)	,368(**)	,637(**)
	Sig. (2-tailed)	0	0	0,001	0	0	0,004	0	0	0	0,65	0,839		0,085	0	0	0
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Y13	Pearson Correlation	0,129	-0,115	,276(**)	,290(**)	,369(**)	,261(*)	,342(**)	,352(**)	,410(**)	-0,019	0,087	0,186	1	,245(*)	0,167	,463(**)
	Sig. (2-tailed)	0,232	0,288	0,01	0,006	0	0,015	0,001	0,001	0	0,858	0,423	0,085		0,022	0,121	0
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Y14	Pearson Correlation	,360(**)	,417(**)	,256(*)	,594(**)	,230(*)	,542(**)	,936(**)	,678(**)	,366(**)	0,084	0,062	,474(**)	,245(*)	1	,288(**)	,730(**)
	Sig. (2-tailed)	0,001	0	0,017	0	0,032	0	0	0	0	0,439	0,571	0	0,022		0,007	0
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Y15	Pearson Correlation	,342(**)	,370(**)	,764(**)	,529(**)	,500(**)	,554(**)	,303(**)	,499(**)	,455(**)	0,175	,215(*)	,368(**)	0,167	,288(**)	1	,686(**)
	Sig. (2-tailed)	0,001	0	0	0	0	0	0,004	0	0	0,104	0,045	0	0,121	0,007		0
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Y TOTAL	Pearson Correlation	,563(**)	,407(**)	,695(**)	,791(**)	,661(**)	,672(**)	,742(**)	,785(**)	,658(**)	,296(**)	,319(**)	,637(**)	,463(**)	,730(**)	,686(**)	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,003	0	0	0	0	0
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).